

Wapres Ma'ruf Amin Ungkap Tiga Isu Krusial di Pemilu 2024

JAKARTA (IM) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyebut ada tiga isu krusial dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang harus dihindari, yaitu hoaks, politik identitas, dan politik uang.

"Saya berpendapat ada tiga isu krusial dalam Pemilu 2024 yang mesti dihindari, karena akan menghambat proses peningkatan kualitas dan pendewasaan demokrasi di Indonesia. Pertama, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan disinformasi seputar pemilu. Lalu, politik identitas, serta politik uang," ungkap Ma'ruf Amin saat peresmian pembukaan Habibie Democracy Forum Tahun 2023, di Jakarta, Rabu (15/11).

Ma'ruf Amin mendorong semua pihak agar bekerja sama untuk menyukseskan Pemilu 2024.

Dia pun berharap agar partisipasi pemilih meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019, dimana tingkat partisipasi pemilih menyentuh angka 81,93%.

"Saya berharap, Pemilu 2024 nanti berjalan lancar sehingga tingkat partisipasi pemilih akan meningkat," ujarnya.

Lebih lanjut, Wapres juga mengatakan bahwa semua yang hadir dalam acara ini memegang peranan yang penting dalam merawat dan meningkatkan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, dia meminta agar Pemilu 2024 bisa dijadikan momentum untuk membangun demokrasi yang lebih baik.

"Mari ciptakan tahun 2024 sebagai momentum untuk membangun lanskap politik dan demokrasi lebih baik demi kemajuan bangsa di masa depan," papar Wapres.

"Sekali lagi, saya mengapresiasi penyelenggaraan Habibie Democracy Forum sebagai wadah yang memfasilitasi diskusi dan senantiasa berupaya memperkuat nilai, institusi, dan praktik demokrasi di Indonesia," tandasnya. ● mei

Kurir Sabu Jaringan Fredy Pratama Divonis 20 Tahun Penjara

BANDARLAMPUNG (IM) - Fajar Reskianto (25), kurir narkoba jaringan Fredy Pratama dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas kepemilikan sabu sebanyak 21 kilogram.

Vonis Majelis Hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bandarlampung yang sebelumnya menuntut hukuman penjara seumur hidup.

Ketua Majelis Hakim Hendro Wickaksono menyatakan, Fajar Reskianto terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum dengan menjadi perantara dalam jual beli narkoba yang beratnya lebih dari 5 gram.

"Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, oleh karena itu pidana penjara selama 20 tahun dan denda sejumlah Rp2 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti pidana penjara 4 bulan," ujar

Hendro, Selasa (14/11).

Hendro melanjutkan, Fajar dijerat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hendro mengungkapkan, hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa melanggar peraturan pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba, perbuatan terdakwa juga dapat merusak generasi muda jika sabu-sabu itu berhasil diedarkan.

Sementara perbuatan yang meringankan terdakwa adalah bersikap sopan selama persidangan, mengakui perbuatannya dan terdakwa berjanji akan berubah menjadi lebih baik.

Atas vonis tersebut, Fajar Reskianto menyatakan pikir-pikir dan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan penasehat hukumnya. ● han

2 Polhukam

FOTO: ANTARA



PEMUSNAHAN BARANG MILIK NEGARA DARI HASIL PENINDAKAN

Kepala Kantor Wilayah Dirjen Bea dan Cukai Jabar Finari Manan (tengah) bersama Kepala Kantor Bea dan Cukai Bogor Amin Tri Sobari (kanan) dan Kepala Satpol PP Kota Bogor Agustian Syach (kiri) menunjukkan rokok dan minuman beralkohol saat pemusnahan barang milik negara dari hasil penindakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bogor, Kota Bogor, Jabar, Rabu (15/11).

Jusuf Kalla Wanti-wanti Pemerintah Jokowi Bisa Jatuh karena Krisis Politik dan Ekonomi

Mantan Wapres Jusuf Kalla sebut sudah banyak pihak yang menyuarakan kegelisahan mereka atas situasi demokrasi di Indonesia saat ini.

JAKARTA (IM) - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, mewanti-wanti ada potensi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa jatuh karena krisis di bidang politik dan ekonomi.

JK - sebutan untuk Jusuf Kalla - menilai bahwa pemerintahan di Indonesia bakal jatuh apabila menghadapi dua krisis sekaligus, yakni krisis politik dan ekonomi. "Kemakmurannya tidak capai, artinya tidak jalan, demokrasinya tidak jalan, maka terjadilah. Karena itulah maka kita harus menghindari itu terjadi pada dewasa ini," katanya dalam acara Habibie Democracy Forum di Jakarta,

Rabu (15/11).

JK sebut pemerintahan Presiden Sukarno runtuh setelah lawan-lawan politiknya ditangkapi, disusul dengan kenaikan harga yang ramai-ramai diprotes oleh masyarakat.

Pada tahun 1998, situasi serupa dialami Presiden Suharto yang pendekatan otoriternya dikecam banyak pihak. Pada saat bersamaan, Indonesia pun dihantam oleh krisis keuangan dunia yang membuat harga melambung tinggi.

Menurut JK, catatan

sejarah itu menunjukkan bahwa krisis politik dan krisis keuangan yang terjadi bersamaan dapat membuat pemerintahan jatuh.

"Jadi 2 krisis bersamaan timbul, (krisis) politik terjadi, ekonomi terjadi waktu yang bersamaan atau saling mempengaruhi maka jatuh lah suatu pemerintahan. Artinya, demokrasinya tidak jalan, tujuannya tak jalan yaitu kesejahteraan," ujar JK.

Berkaca pada situasi terkini, JK menilai sudah banyak pihak yang menyuarakan kegelisahan mereka atas situasi demokrasi di Indonesia. JK pun termasuk pihak yang menilai demokrasi di

penghujung masa jabatan Jokowi sedang tidak baik-baik saja.

"Pak Jokowi bagus pertamanya, bukan karena saya ada di situ, saya tahu betul tidak ada masalah. Tapi setelah 10 tahun, ah, seperti tadi dikatakan (demokrasi mulai bermasalah)... Belum 10 tahun sudah bermasalah demokrasi kita di Indonesia ini dengan segala macam masalahnya," kata JK lebih lanjut.

Retorika pemerintah akan menggelar pemilihan umum dengan aman dan bebas belum tentu sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Di samping dunia

pun menghadapi situasi ekonomi yang sulit dan itu telah diakui oleh pemerintah Indonesia.

JK mengatakan, perlu ada kepemimpinan yang menghormati kedaulatan rakyat untuk menghindari Indonesia dari potensi krisis politik dan keuangan tersebut.

"Presiden (Jokowi) mengatakan ngeri, Menteri Keuangan mengatakan ngeri, maka kalau ini dampaknya bersamaan, maka kita harus hati-hati. Di situ dibutuhkan suatu kepemimpinan yang kuat, yang menghormati kedaulatan rakyat, artinya kembali ke jalur demokrasi yang baik," katanya. ● han

Dinas Indagkopukm Kota Tangerang Raih Penghargaan Dari Kemendag RI



Foto bersama Koordinator Bidang Kelembagaan dan Penilaian Kemetrolgian Direktorat Metrologi Kemendag, Hero Soebroto dan Kepala BSML Regional I, Kurniati Anisa dan lain-lain.

KOTA TANGERANG (IM) - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Indagkopukm) Kota Tangerang meraih penghargaan dari Kementerian Perdagangan RI pada Kategori Pasar Tertib Ukur di Hotel Pullman, Bandung, Jumat (10/11).

Pasar Tertib Ukur sendiri merupakan predikat yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan RI kepada pasar tradisional yang seluruh alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya yang digunakan dalam transaksi perdagangan di pasar tersebut telah memenuhi tanda tera sah yang berlaku.

Tera adalah menandai dengan tanda tera sah atau batal yang berlaku atau memberikan keterangan - keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau batal yang berlaku, yang dilakukan oleh pegawai berhak berdasarkan pengujian. Sementara tera ulang adalah pengujian kembali secara berkala terhadap Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTIP) dan yang dipakai dalam perdagangan.

Kota Tangerang mendapatkan raihan penghargaan Pasar Tertib Ukur terbanyak se-provinsi Banten. Adapun sebanyak lima pasar yang dikelola Pemerintah Daerah mendapatkan penghargaan antara

lain, Pasar Malabar, Pasar Poris Indah, Pasar Anyar, Pasar Grendeng, Pasar Ramadan.

Kepala UPT Metrologi Pelayanan, Nur Hidayati mengatakan, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh Pasar agar dapat dikategorikan sebagai Pasar Tertib Ukur. "Pertama ada struktur organisasi, kedua semua alat ukur takar timbangan dan perlengkapannya yang ada di pasar tersebut sudah dilakukan tera secara rutin, dan ketiga ada sosialisasi juga kepada para pedagang tentang pentingnya pelaksanaan tera dan penggunaan timbangan dengan baik dan benar," ujarnya saat

diwawancara oleh awak media di kantornya, Selasa (14/11).

Penilaian evaluasi Pasar Tertib Ukur 2023 ini dilakukan oleh Kementerian Perdagangan, dalam hal ini Direktorat Metrologi pada tahun 2022.

Lebih lanjut, Nur Hidayati berharap, di tahun tahun mendatang akan banyak pasar di Kota Tangerang yang dapat penghargaan dari Kemendag. "Saya berharap pasar yang sama bisa tetap dapat penghargaan ditambah dengan pasar-pasar yang lain sehingga dapat terwujud di wilayah Kota Tangerang," tutupnya. ● Adv



PENGUMUMAN

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Prima Koalindo Kotabaru atau Circular Resolutions Of The Shareholders In Lieu Of The Extraordinary General Meeting Of The Shareholders Of PT Prima Koalindo Kotabaru tertanggal 13 November 2023, sebagaimana dimuat dalam akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham tertanggal 15 November 2023, nomor 28, dibuat di hadapan Dini Lastari Siburian, SH., Notaris di Jakarta Selatan, telah menyetujui pembubaran Perseroan terhitung sejak 13 November 2023.

Bagi para kreditor dapat menghubungi Bapak WILKINS HUMPHREY BERKELEY SARAGIH selaku Likuidator Perseroan di alamat Gedung 46 Abdul Muis Lantai 5 & 6, Jalan Abdul Muis Nomor 46 Petjo Selatan, Jakarta Pusat dan melalui email: wilkinhsbs@gmail.com, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah pengumuman ini dimuat.

Demikian pengumuman ini disampaikan guna memenuhi pasal 147 dan pasal 149 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 16 November 2023

Likuidator Perseroan

WILKINS HUMPHREY BERKELEY SARAGIH

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PERMADANI KHATULISTIWA NUSANTARA ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 04 Desember 2023
Waktu : Pukul 10.00 WIB - selesai
Tempat : Rajawali Place Lantai 25, Jl. HR. Rasuna Said Kav. B/4, Setiabudi, Jakarta Selatan 12910.

Dengan Agenda RUPS Tahunan sebagai berikut:

- Pemberian dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan RUPS Tahunan untuk Tahun Buku 2022, persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2022 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2022.
- Penujukkan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Catatan:

- Para Pemegang Saham Perseroan yang berhak untuk hadir atau diwakili dalam RUPS Tahunan adalah mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sampai dengan tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan ini.
- Para Pemegang Saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam RUPS Tahunan dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dan memberikan suara atas namanya dalam RUPS Tahunan dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa dari Para Pemegang Saham Perseroan dalam RUPS Tahunan, namun dengan ketentuan bahwa suara yang dikeluarkan oleh mereka selaku kuasa tidak dapat dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan/kuorum dalam RUPS Tahunan.
- Salinan Surat Kuasa tersebut harus telah diterima oleh Perseroan paling lambat pada tanggal RUPS Tahunan.
- Asli Surat Kuasa yang diberikan oleh Pemegang Saham Perseroan tersebut dan salinan kartu tanda pengenal dari kuasanya yang sah harus telah diserahkan kepada Perseroan sebelum kuasa tersebut hadir dalam RUPS Tahunan.
- Demi terselenggaranya RUPS Tahunan secara efisien dan teratur, Para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Para Pemegang Saham Perseroan dimohon untuk hadir di tempat rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS Tahunan dimulai.

Jakarta, 16 November 2023

PT PERMADANI KHATULISTIWA NUSANTARA

Direksi

Bakamla Tangkap Tiga Kapal Berbendera RI, Mengangkut Nikel Ilegal di Kolaka Utara

JAKARTA (IM) - Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI menangkap tiga kapal berbendera Indonesia membawa ore nikel ilegal di Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Petugas Bakamla dengan kapal KN Kuda Laut-403 menyergap tiga kapal, masing-masing TB Trinity 302/TK Pacific 302, TB MDM Batola/TK MDM 04, dan TB Merdeka 2002/TK Dirgahayu 3102. Ketiga kapal tersebut menggunakan dermaga yang tak berizin tapi menyiasatinya dengan dokumen lain.

Pranata Humas Ahli Muda Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Kapten Yuhanes Antara, mengatakan, awalnya pihaknya mendapat laporan masyarakat tentang kegiatan penambangan nikel ilegal di Desa Mosiku, Batu Putih, Kolaka Utara. Nikel itu diangkut dengan kapal-kapal melalui dermaga yang tak berizin.

"Kapal tersebut melaksanakan muat di Jetty (dermaga) Massel yang tidak berizin dan tidak sesuai Surat Perseetujuan Berlayar (SPB). Penangkapan dilaksanakan pada Sabtu (11/11), dan lebih lanjut diserahkan kepada Polres Kolaka Utara keesokan harinya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut," tulis siaran pers Humas Bakamla RI, dikutip pada Rabu (15/11).

Pada hari yang sama, Bakamla menangkap kapal TB MDM Batola/TK MDM 04 dengan muatan ore nikel 12.333.963 Wmt. Terakhir, Bakamla menyergap kapal TB Merdeka 2002/TK Dirgahayu 3102 yang membawa ore nikel 8.500 Wmt pada Senin (13/11).

"Kedua kapal tersebut diduga melaksanakan muat di Jetty (dermaga) Mandes yang tidak berizin dan tidak sesuai SPB," demikian isi siaran pers.

Ketiga kapal tersebut disebut melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran dan UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 300 juncto Pasal 105 UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Kemudian Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. ● mei